



All Under Heaven; Analisis Diplomasi COVID-19 Tiongkok di Fase Awal Krisis Pandemi

(Wahyu Setiyo Aji), (Dr. Reni Windiani, MS), (Fendy E. Wahyudi, S.IP.,M.Hub.Int)

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic is a shared threat that results in a multidimensional crisis. However, the response of countries was contrary to what was expected. During a pandemic crisis — at a time when international solidarity is urgently needed — countries are on the contrary “inward-looking”. The only country that emerged in the early phase of the pandemic crisis and offered assistance in handling the global pandemic was China. This raises questions about China's motives and reasons for providing foreign aid. Why did China emerge as a donor when other countries did the opposite? Culture significantly influences the direction of China's foreign policy. How China views the world is conceptualized in the Tianxia theory. China's foreign aid for pandemic recovery believes in the concepts of internalization of world order, relational relativity, and Confucianism Improvement. These values belong only to China, which explains why China has emerged as a differentiator on the international stage. This study shows that unconventional IR theory is not just an alternative but an appropriate analytical tool to analyze specific issues. Future research is expected to find gaps in international relations and contribute to a new understanding of issues in international politics...

Keywords: *Pandemic Handling Assistance, China, Tianxia, World Political System.*

PENDAHULUAN

Pada bulan Desember 2019, sebuah wabah muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok yang kemudian teridentifikasi sebagai virus varian baru; SARS-CoV-2. Pada saat itu, negara-negara belum mempunyai SOP tentang cara mengatasi COVID-19, sehingga wabah ini menyebar pesat dan berkembang dari epidemi menjadi pandemi. COVID-19 menimbulkan krisis kesehatan global yang dibarengi krisis multidimensi lainnya. Negara-negara maju mengalami waktu yang sulit dalam mengentaskan pandemi di wilayah domestiknya. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi negara-negara berkembang dan terbelakang yang memiliki keterbatasan kemampuan penanganan pandemi. Negara-negara terbelakang menjadi pihak yang paling terdampak akibat adanya pandemi ini, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari komunitas internasional (United Nations, 2021).

Apa yang terjadi (*das sein*) justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan (*das sollen*). Dalam situasi krisis pandemi, negara-negara justru menyembunyikan kemampuannya dengan bersikap “*inward-looking*” dan mengabaikan solidaritas internasional. Negara-negara donor tradisional menarik diri dari perannya sebagai penyedia barang kebutuhan global dan meninggalkan dunia dalam keterpurukan.

Satu-satunya negara yang muncul sebagai donatur penanganan krisis global di fase awal pandemi COVID-19 adalah Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok memberikan bantuan kepada berbagai negara yang terdampak pandemi dengan tetap memprioritaskan negara-negara berkembang dan terbelakang. Kemunculan Tiongkok yang hampir monopolistik ini kemudian memunculkan sebuah perdebatan mengenai alasan Tiongkok memberikan bantuan di saat negara-negara lain justru bersikap sebaliknya.

Terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai pemberian bantuan pandemi Tiongkok, namun sebagian besar di antaranya hanya membahas mengenai propaganda-propaganda yang ada. Hal ini merupakan analisis dari sudut pandang luar, stigmatisasi serta sebuah bentuk pengamatan berjarak. Salah satu jurnal terdahulu yang ditulis oleh Suisheng Zhao berjudul “Rhetoric and Reality of China’s Global Leadership in the Context of COVID-19” menyimpulkan bahwa pemberian bantuan pandemi Tiongkok belum cukup untuk mengalahkan propaganda “Anti-Tiongkok” Amerika Serikat (Zhao, 2020). Selain itu sebuah *brief* politik luar negeri yang ditulis oleh Michael Green & Evan S berjudul “This Pandemic won’t make China the World’s Leader” juga beranggapan bahwa bantuan penanganan pandemi yang dilakukan Tiongkok hanyalah upaya untuk menggeser kepemimpinan Amerika Serikat semata (Green & Medeiros, 2020). Dalam berbagai publikasi, diplomasi kesehatan yang dilakukan Tiongkok mendapatkan penafsiran merendahkan yang menuduh Tiongkok memanfaatkan krisis global untuk kepentingan politis.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dan berbeda dari penelitian yang pernah ada, penelitian ini berupaya untuk menganalisis perilaku Tiongkok menggunakan perspektif Tiongkok itu sendiri. Tiongkok percaya bahwa politik luar negeri yang baik berawal dari pemahaman akan “*Shi*” (istilah Tiongkok yang melambangkan sistem internasional [*world order*]) dan bagaimana Tiongkok memandang sistem internasional tergambar jelas dalam teori Tianxia. Tianxia dikembangkan oleh salah seorang filsuf paling berpengaruh di Tiongkok, Zhao Tingyang yang mencoba membangun pandangan Tiongkok tentang dunia dengan berdasar pada sejarah budaya Tiongkok. Zhao merekonstruksikan konsep-konsep Tianxia dari masa Dinasti Zhou (1046 – 771 SM) dan menyesuaikannya dengan perkembangan abad ke-21 agar dapat direalisasikan (Zhao 赵汀阳, 2021).

Tianxia menawarkan sebuah sistem alternatif — sebuah sistem bersama yang diklaim lebih baik dari sistem politik internasional yang ada saat ini dan untuk mewujudkannya Zhao mengemukakan tiga konsep yaitu; *internalization of world order*, *relational relativity*, dan *confucian improvement*. Ketiga konsep ini mengarah pada penyelesaian konflik dengan meminimalkan permusuhan dan mengedepankan keramahan, mengubah musuh menjadi teman, serta mengedepankan persamaan di atas perbedaan, sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat dunia yang beragam. Tianxia bertujuan untuk menciptakan sistem internasional yang dapat menjadi “titik kebajikan” dan pedoman di masa krisis (Yang, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mencapai pemahaman komperhensif mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang berupaya menjelaskan hubungan kausalitas antara nilai-nilai tradisional Tiongkok dengan pemberian bantuan penanganan pandemi COVID-19. Untuk menjawab pertanyaan penelitian — penulis mengumpulkan data primer dan sekunder

menggunakan studi pustaka dan mengolahnya agar memperoleh analisis dan interpretasi data yang valid dan kredibel.

PEMBAHASAN

Diplomasi Penanganan Pandemi COVID-19 Tiongkok

WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) pada 30 Januari 2020 dan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Tiongkok mengatakan telah memberi waktu kepada dunia untuk mengamati dan bersiap selagi Tiongkok menjadi negara pertama yang berhadapan dengan COVID-19 (Yuan, 2020). Meskipun demikian negara-negara tetap tidak memperkirakan dampak luar biasa yang mampu diakibatkan oleh pandemi COVID-19, sehingga banyak dari mereka kewalahan dan membutuhkan bantuan dari komunitas internasional (Kobierecka & Kobierecki, 2021).

Setelah berhasil mengontrol penyebaran virus domestik, Tiongkok mulai memberikan bantuan luar negeri pada pertengahan Maret 2020 yang dinamakan dengan diplomasi masker. Pada awal periode — Tiongkok membingkai bantuan penanganan pandemi COVID-19 sebagai “*Reproccating aid*” atau bantuan balas budi dengan berfokus menawarkan bantuan kepada negara-negara yang telah lebih dulu membantu Tiongkok pada awal merebaknya wabah di Wuhan. Sebagai wujud syukur atas bantuan komunitas internasional di awal penanganan pandemi tersebut, Tiongkok berniat membalas jasa bagi mereka yang membutuhkan.

Diplomasi masker Tiongkok dibagi kedalam dua kategori yaitu donasi dan komersial. Donasi perlengkapan medis Tiongkok pada periode Maret hingga April 2020 telah mengalami peningkatan hingga 400%, sedangkan ekspor komersial medis meningkat hampir dua kali lipat dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Diplomasi masker Tiongkok dilakukan melalui berbagai metode di antaranya; *government to government*, kerjasama dalam bidang teknologi kesehatan, kerja sama di tingkat sub-nasional, dan bantuan non-pemerintah. Angka pasti pengeluaran Tiongkok untuk bantuan pandemi sangat sulit ditentukan karena metodologi donor Tiongkok dan ketidakjelasan seputar bantuannya (Kurtzer, 2020). Berdasarkan data, hampir semua negara mengimpor perlengkapan medis dari Tiongkok pada periode ini. Amerika Serikat menjadi importer terdepan yang kemudian disusul oleh Jerman dan Jepang pada posisi berikutnya. Sedangkan negara penerima donasi terbesar Tiongkok dipimpin oleh Ethiopia, Italia, Korea Selatan, Hungaria, Luxemburg, dan Amerika Serikat pada saat yang bersamaan (Fuchs et al., 2020).

Seiring dengan merebaknya COVID-19 yang semakin tidak terkendali, negara-negara Eropa mulai menyaingi dan menggantikan posisi Tiongkok sebagai episentrum baru pandemi. Tiongkok mengirimkan tim medis beserta 30ton persediaan medis kepada Italia untuk membantu penanganan COVID-19. Selain itu perusahaan-perusahaan di Tiongkok seperti Huawei juga ikut memberikan kontribusi dengan menawarkan konektivitas antar rumah sakit di Italia dan rumah sakit di Kota Wuhan menggunakan “*cloud computing*”. Tiongkok juga mengirimkan bantuan kepada Spanyol, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya yang mengalami dampak parah akibat pandemi COVID-19. Alibaba Foundation, Oppo, Xiaomi, dan perusahaan Tiongkok lainnya juga mendonasikan ribuan masker kepada negara-negara Eropa. Pada 23 Maret 2020 saja,

terdapat 20 negara yang menerima donasi perlengkapan medis dari perusahaan-perusahaan Tiongkok (Verma, 2020). Sedangkan hingga akhir Maret 2020, Tiongkok telah berhasil mengirimkan masker kepada lebih dari 120 negara di seluruh dunia. Angka ini semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam diplomasi masker Tiongkok (Fuchs et al., 2020).

Setelah diplomasi masker, Tiongkok juga melakukan diplomasi vaksin. Diplomasi vaksin juga dibagi ke dalam kategori donasi dan komersial. Hingga 30 Mei 2022, Tiongkok telah mendonasikan lebih dari 243 juta vaksin keseluruh dunia, dengan perincian: Asia Pasifik sebanyak 141 juta dosis, Afrika 74,7 juta dosis, dan Amerika Latin sebanyak 12,8 juta dosis. Sedangkan total dosis vaksin yang telah dijual Tiongkok mencapai 1,90 miliar dosis. Afrika membeli 186 juta dosis vaksin, Eropa 123 juta dosis, Amerika Latin 396 juta dosis, dan Asia Pasifik membeli sebanyak 938 juta dosis vaksin dari Tiongkok. Dari angka yang fantastis ini Tiongkok telah berhasil mendistribusikan lebih dari 1,59 Miliar dosis, dengan 890 juta dosis ke Asia Pasifik, 290 juta dosis ke Amerika Latin, 125 juta dosis ke Benua Afrika, dan 57,5 juta dosis ke Kawasan Regional Eropa (Bridge Beijing, 2022).

Tiongkok juga bergabung ke dalam Covax (sebuah badan internasional yang bertujuan membantu negara berkembang mendapat akses terhadap vaksin COVID-19) pada Oktober 2020. Pada awal periode bergabung, Tiongkok berkomitmen mengirimkan 10 juta dosis vaksin untuk penggunaan darurat negara berkembang melalui Covax sebagai media perantaranya dan komitmen awal ini telah berhasil direalisasikan. Hingga September 2021 — Covax telah membeli 550 juta dosis vaksin dari Tiongkok. Tiongkok bahkan telah mendonasikan US\$.100 juta kepada institusi ini. Secara keseluruhan Covax telah menjual lebih dari 275 juta dosis vaksin Tiongkok dengan 160 juta di antara telah berhasil didistribusikan. Terdapat ragam variasi dari vaksin yang diproduksi oleh Tiongkok. Beberapa perusahaan vaksin yang mendapatkan dukungan dari pemerintah Tiongkok di antaranya: Sinopharm, CanSinoBIO, Sinovax, Anhui Zhifei Longcom Bio, dan IMBCAMS. Sinovax merupakan pemasok terdepan dengan 848 juta dosis penjualan tersebar di 48 negara. Sedangkan Sinopharm merupakan garda terdepan dalam pemberian donasi vaksin Tiongkok yang telah menyumbangkan lebih dari 103 juta dosis kepada 79 negara (Bridge Beijing, 2022).

Besarnya upaya yang dilakukan oleh Tiongkok, baik dalam diplomasi masker maupun diplomasi vaksin melambangkan posisi Tiongkok yang hampir “monopolistik” di fase awal penyebaran pandemi global. Negara-negara lain belum mampu atau bahkan menolak untuk memberikan bantuan dan menyediakan barang kebutuhan global di masa krisis. Negara-negara donor tradisional tidak memiliki respon yang jelas dan bahkan meninggalkan solidaritas. Terlepas dari tuduhan kepada motif dan bantuan luar negerinya — Tiongkok merupakan aktor penting yang membantu banyak negara pulih dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19.

Nilai-Nilai Tradisional Tiongkok Sebagai Dasar Politik Luar Negeri Tiongkok

Tidak diragukan lagi bahwa pandemi COVID-19 merupakan krisis terbesar yang pernah dihadapi dunia sejak perang dunia II, resesi ekonomi global pertama semenjak krisis keuangan Asia 1997, dan merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 membuktikan banyak negara belum siap menghadapi

besarnya skala penyebaran penyakit beserta dampak yang diakibatkannya. Pandemi COVID-19 tidak hanya menguji ketahanan negara, tetapi juga turut menguji ketahanan sistem internasional. Sistem yang tidak dapat beradaptasi dengan krisis dan perubahan bukanlah sebuah sistem yang bagus. Persaingan bebas dan kompetisi untuk memaksimalkan keuntungan mungkin mampu mendorong perekonomian global, akan tetapi negara akan kembali kepada egonya masing-masing dan meninggalkan yang lain dalam keterpurukan di masa-masa krisis. Negara hanya akan memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan solidaritas jika diperlukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini bukanlah “negara yang gagal” melainkan “dunia yang gagal” (Zhang, 2005).

Tiongkok menjadi pusat perhatian di fase awal krisis pandemi karena Tiongkok melakukan diplomasi masker di saat negara-negara lain bersikap “*inward-looking*”. Seringkali kita melihat dan membicarakan “bagaimana dunia memandang Tiongkok”, namun melupakan sudut pandang mengenai “bagaimana Tiongkok memandang dunia”. Tiongkok percaya bahwa politik luar negeri yang baik didasarkan pada pemahaman akan “*Shi*” (istilah Tiongkok untuk sistem internasional). Oleh sebab itu memahami persepsi Tiongkok terhadap sistem internasional menjadi poin penting dalam memahami politik luar negeri Tiongkok. Bagaimana Tiongkok memandang sistem internasional terkonsep jelas dalam Tianxia. Tianxia merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Zhao Tingyang dan menawarkan sistem internasional alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai sejarah budaya Tiongkok. Zhao berupaya menginvestasikan Tianxia sebagai kerangka berpikir mengenai politik internasional (Zhang, 2005).

Zhao Tingyang mengemukakan tiga konsep akar berdirinya Tianxia yaitu: *internalization of world order*, *relational relativity*, dan *confucian improvement*. **Pertama** *Internalization of World Order*. Internalisasi sistem internasional diartikan sebagai upaya membangun sebuah dunia tanpa “*outsider*” — menjadikan dunia dalam dimensi fisik (negara-negara) menyatu dengan dimensi politis (sistem politik). Dengan kata lain, Tianxia berupaya untuk menciptakan sebuah sistem politik dunia di mana semua entitas mau untuk tergabung di dalamnya. Untuk mewujudkan *internalization of world order* — dunia harus mendefinisikan nilai bersama dengan keuntungan yang besar daripada kepentingan mengucilkan pihak lain, sehingga tercapailah prinsip penting dari Tianxia yaitu “*the exclusion of nothing and no one*” atau “*the inclusion of all peoples and all lands*” (Zhang, 2005).

Presiden Xi Jinping mencetuskan sebuah gagasan yang dinamakan dengan “*the Communities of Shared Future for Mankind*” pada tahun 2013. Inti dari CSFM menegaskan bahwa dunia saat ini sedang berada di bawah takdir yang sama dan membangun komunitas untuk menghadapi persamaan takdir tersebut merupakan suatu keharusan. CSFM ini dapat dilihat sebagai sebuah gagasan yang melibatkan semua entitas dalam paradigma pertimbangan. Dengan kata lain CSFM merupakan sebuah gagasan dengan dunia (dalam pengertian fisik) sebagai unit analisis tertingginya. Analisis dalam politik internasional Tiongkok tidak berhenti pada negara bangsa, melainkan berlanjut pada dunia sebagai unit analisis tertingginya (Yang, 2021).

CSFM dituliskan dalam konstitusi Partai Komunis Tiongkok tahun 2017. Selain itu gagasan ini juga terekam dalam Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, dan Komite Utama Majelis Umum PBB. CSFM semakin sering diutarakan dalam berbagai forum internasional seperti: ASEAN, G20, African Union, dan European Union dalam

rangka menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya kerjasama internasional penanganan pandemi dilakukan. Tiongkok berupaya mendapatkan dukungan masyarakat internasional agar melihat bantuan luar negeri penanganan pandemi Tiongkok sebagai bentuk perjuangan Tiongkok melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama dalam skema besar kerja sama internasional yang mengedepankan CSFM (Prabandari, 2020). Hal ini sesuai dengan pernyataan Guan Zi yang mengatakan “*To fight for Tianxia, one has to fight for people first*”. Diplomasi masker dan kerja sama penanganan pandemi COVID-19 merupakan upaya Tiongkok untuk memenangkan dukungan dari masyarakat internasional yang dikemukakan langsung oleh Xi (2020) dalam pidato internalnya dengan mengatakan;

“... to liaise and communicate with other countries and regions, to share information about the outbreak and containment strategies to win international understanding and support.”

Kedua adalah penerapan *relational relativity*. Berbeda dari relasional individu yang memprioritaskan kepentingan individu — relasional relativitas beranggapan bahwa meminimalkan konflik dan perselisihan merupakan hal yang lebih penting daripada memaksimalkan kepentingan individu. Dengan kata lain, memaksimalkan keamanan bersama jauh lebih penting daripada mengejar strategi nasional (Zhao 赵汀阳, 2021).

Negara-negara bersikap “*inward-looking*” di fase awal krisis pandemi merupakan bentuk dari rasionalitas individu. Mereka lebih memilih untuk memaksimalkan strategi nasionalnya dibandingkan menjaga keamanan bersama. Ketika masker dan persediaan medis menjadi barang langka — individu, entitas, dan negara mulai berkompetisi untuk mendapatkannya. Amerika Serikat melakukan “penyitaan” masker yang ditujukan untuk Jerman di Bandara Internasional Bangkok dan mengalihkannya menuju negaranya sendiri. Hal ini dilihat Menteri Dalam Negeri Jerman, Andreas Giesel sebagai sebuah bentuk “perompakan modern” yang seharusnya tidak dilakukan di masa krisis sekalipun (The Guardian, 2020).

Negara-negara cenderung menyembunyikan kekuatannya dan menyimpan kelebihan untuk dirinya sendiri. Mereka lebih memilih untuk menimbun persediaan dan bersiap menghadapi kemungkinan di masa depan daripada membantu tetangga mereka yang saat itu juga sangat membutuhkan bantuan. Negara-negara Uni Eropa merupakan perumpamaan yang logis untuk hal ini. Uni Eropa memiliki Pusat krisis yang dinamakan dengan “*The Union Civil Protection Mechanism*”. Melalui pusat krisis ini — negara Uni Eropa dapat meminta bantuan kepada negara anggota lainnya untuk menghadapi krisis yang telah berada di luar kemampuan penanganannya sendiri. Italia pernah mengaktifkan pusat krisis dan meminta bantuan dalam menghadapi COVID-19, akan tetapi tidak ada satupun dari 27 negara anggota Uni Eropa yang datang membantu Italia, bahkan setelah lewat 2 bulan sejak Italia memohon bantuan. Negara-negara Uni Eropa memang harus memastikan persediaan medis untuk dirinya sendiri, namun pada kala itu tidak ada negara Eropa yang mengalami krisis pandemi seburuk Italia. Per-14 Maret 2020, masih banyak negara-negara Uni Eropa yang hanya berhadapan dengan puluhan atau ratusan kasus infeksi seperti; Finlandia dengan 225 kasus; Austria 655 kasus; Portugal 195 kasus; Irlandia 90; Rumania 109; Polandia 93; Bulgaria 37; dan Hungaria 25 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa penyebaran pandemi di negara mereka masih berada dalam kendali di saat Italia mencatat lebih dari 20.000 kasus infeksi dan lebih dari 1.000 kematian akibat pandemi. Di saat negara-negara tetangga menolak untuk bertindak — Tiongkok datang

dan membawa 30ton persediaan medis bersama tim tenaga medisnya untuk membantu Italia berhadapan dengan COVID-19 (Braw, 2020).

Sikap-sikap relativitas individual mendorong negara-negara bersifat “*inward-looking*” selama fase awal krisis pandemi, sedangkan hal yang mendorong Tiongkok bersifat “*outward-looking*” adalah kebalikannya (relativitas relasional). Berbeda dari negara lain, Tiongkok tidak menimbun persediaan medis untuk dirinya sendiri. Segera setelah Tiongkok mulai pulih dari pandemi — Tiongkok mulai melakukan diplomasi maskernya. Wakil ketua CIDCA (*China International Development Cooperation Agency*) Baoqing juga menekankan bahwa bantuan penanganan pandemi Tiongkok dilakukan dalam rangka kerja sama internasional dengan masyarakat internasional. Pernyataan ini melegitimasi bahwa Tiongkok mengedepankan kerja sama daripada persaingan dan kompetisi. Diplomasi yang dilakukan secara luas ke berbagai pihak juga menunjukkan inklusifitas seperti yang coba diwujudkan oleh Tianxia “*the inclusion of all peoples and all lands*” (Zhang, 2005).

Ketiga adalah keyakinan akan *Confucian improvement*. Improvisasi konfusian memiliki posisi lebih tinggi dari improvisasi pareto yang menggambarkan pengalokasian dan mobilisasi sumber daya akan meningkatkan setidaknya satu individu tanpa merugikan individu lainnya. Improvisasi pareto tidak banyak dipraktikan, karena tidak adanya dorongan yang cukup bagi negara untuk melakukannya. Moralitas tidak dapat menggantikan kepentingan, sehingga membutuhkan lebih dari sekedar improvisasi pareto agar negara-negara mau melakukan aksi di masa krisis. Improvisasi konfusian menganggap peningkatan terhadap kesejahteraan satu individu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan semua pihak. Dengan kata lain, Improvisasi konfusian meyakini semua pihak akan mendapat manfaat dengan melakukan improvisasi pareto (Zhao 赵汀阳, 2021).

Dalam konteks dan situasi pandemi COVID-19, peningkatan kesejahteraan dimulai dengan memprioritaskan pemulihan pandemi. Ketika negara pulih dari krisis pandemi — negara tersebut dapat mulai berbenah diri, membuka kembali sektor-sektor perekonomian, dan melakukan aktivitas normal secara bertahap. Ketika pulih dari krisis pandemi — negara akan mendapatkan kapasitas dan kapabilitasnya kembali untuk melakukan kerja sama internasional di berbagai bidang. Dari kerja sama ini maka negara lain akan mendapatkan keuntungan atas peningkatan kesejahteraan suatu negara. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara memerlukan alokasi sumber daya dan bantuan. Tiongkok telah memobilisasikan persediaan medis, kas dan bantuan teknis ke berbagai negara. Hingga Juli 2020, Tiongkok telah berhasil menyumbangkan US\$50 juta kepada WHO dan mendelegasikan bantuan penanganan pandemi kepada lebih dari 150 negara (Yi, 2020).

Pemberian bantuan Tiongkok juga meningkatkan sentimen antara negara donor dengan penerima donor yang dapat dilihat dari ucapan terima kasih dan ungkapan syukur atas bantuan pandemi Tiongkok. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez menyuarakan rasa bersyukur dalam cuitannya di Twitter dan berharap kerjasama perdagangan yang lebih mudah ke depannya antara Spanyol dan Tiongkok. Hal ini direalisasikan oleh menteri luar negeri Tiongkok dan Spanyol yang telah sepakat menjalin hubungan kerja sama bilateral lebih erat pada pertemuan G20 di Bali 2022 (Scimia, 2020).

Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Ketika suatu negara masih berhadapan dengan ancaman COVID-19, maka tidak ada negara yang benar-benar aman dari pandemi. Hal ini sesuai pernyataan Deputy Sekretaris Jendral PBB yang mengatakan; “*no one will ever be truly safe, until everyone is.*” (Mohammed, 2020). Sehingga penurunan kesejahteraan satu individu juga akan berdampak pada penurunan kesejahteraan yang lainnya. Berdasarkan analisis improvisasi konfusian ini dan berakar dari prinsip konfusius yang mengatakan “*establishing oneself as a person by establishing others, enlarging oneself by enlarging others*” — Tiongkok melakukan diplomasi masker dan kerja sama penanganan pandemi COVID-19 secara global (Zhao 赵汀阳, 2021).

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan telah menjadi titik kelemahan bagi Tiongkok. Tiongkok berada pada posisi yang rawan untuk dijadikan kambing hitam atas merebaknya pandemi secara global. Terlebih lagi negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya sangat gencar dalam menyudutkan Tiongkok sebagai pihak yang bersalah atas pandemi. Stigmatisasi, paradigma anti-Tiongkok, dan berbagai konotasi negatif disematkan oleh barat kepada Tiongkok, menjadikan penilaian mereka tidak bersifat objektif, melainkan subjektif. Pemberian bantuan luar negeri penanganan pandemi Tiongkok juga sering dipandang “sebelah mata” dengan analisis sudut pandang luar. Padahal untuk memahami perilaku Tiongkok — kita perlu melihat bagaimana Tiongkok memandang dunia dan bukan (sebaliknya) bagaimana dunia memandang Tiongkok.

Nilai-nilai budaya tradisional sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri Tiongkok. Hal ini terlihat dari strategi kebijakan luar negeri Xi Jinping yang dinamakan dengan “*Major-country diplomacy with Chinese characteristics*”. Selain itu semboyan 走自己的路 *zou zijidelu* yang berarti berjalan dengan caranya sendiri juga menjadi legitimasi bahwa Tiongkok mendasarkan kebijakan luar negerinya pada nilai-nilai tradisional Tiongkok. Tiongkok memiliki banyak nilai-nilai tradisional lama dalam konfusianisme, namun penjelasan mengenai cara Tiongkok memandang dunia terkandung dalam sebuah teori yang dinamakan “Tianxia”. Terdapat tiga konsep utama Tianxia yaitu; *Internalization of world order*, *relational relativity*, dan *confucian improvement*.

Internalization of world order bertujuan untuk menciptakan dunia tanpa “outsider” dan untuk merealisasikannya diperlukan nilai bersama. Dalam hal ini Presiden Xi mengemukakan gagasan “*the Communities of Shared Future for Mankind*” yang merupakan upaya Tiongkok mendefinisikan nilai bersama dalam mewujudkan *internalization of world order*. Gagasan ini semakin sering ditekankan diberbagai forum internasional untuk menunjukkan bagaimana kerja sama penanganan pandemi seharusnya dilakukan. Tiongkok memberikan bantuan luar negeri penanganan pandemi sebagai bentuk mengedepankan kerja sama di atas persaingan dan kompetisi sesuai konsep *relational relativity*. Hal ini ditekankan Wakil Ketua CIDCA yang menegaskan bantuan penanganan pandemi Tiongkok dilakukan dalam rangka kerja sama internasional dengan masyarakat internasional. Tiongkok juga berusaha mendapatkan dukungan masyarakat internasional agar melihat bantuan luar negeri penanganan pandemi Tiongkok sebagai bentuk dari perjuangan Tiongkok melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama dalam skema besar kerja sama internasional yang mengedepankan gagasan CFSM. Bantuan penanganan pandemi Tiongkok juga merupakan perwujudan dari *confucian improvement*

dan didasarkan pada prinsip konfusius yang mengatakan “*establishing oneself as a person by establishing others, enlarging oneself by enlarging others.*”.

Moralitas semata tidak mampu untuk mendorong negara-negara mengambil tindakan yang diperlukan (dengan memberikan bantuan) di masa krisis. Tiongkok menjadi satu-satunya negara muncul menyediakan bantuan karena Tiongkok mempunyai nilai-nilai tradisional yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi dasar dari perumusan kebijakan luar negeri Tiongkok. Hal ini menjelaskan mengapa Tiongkok muncul sebagai pembeda dan satu-satunya donatur di fase awal krisis pandemi pada saat negara-negara lain justru mengambil sikap kebalikannya. Teori konvensional sangat didominasi oleh nilai-nilai barat, padahal untuk menganalisis perilaku — diperlukan perspektif dari subjek penelitian itu sendiri. Penelitian ini berhasil memberikan penjelasan mengenai alasan Tiongkok muncul sebagai pembeda dan satu-satunya donatur internasional di fase awal krisis pandemi. Meskipun demikian, banyak ranah isu internasional yang belum tersentuh teori-teori non-konvensional. Para peneliti selanjutnya dapat mencoba untuk menganalisis fenomena internasional lain menggunakan teori HI dari sudut pandang subjek yang diteliti itu sendiri, sehingga peneliti akan menyumbangkan aspek kebaruan mengenai bagaimana teori tersebut dapat diaplikasikan dalam aktor dan tujuan yang seharusnya, karena “*Theory is always for someone and for some purpose*”.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Reni Windiani, MS, selaku dosen pembimbing 1, Bapak Fendy E Wahyudi, S.I.P.,M.Hub.Int., selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Muhammad Arief Zuliyani, S.IP, LL.Mt, selaku dosen penguji yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Braw, E. (2020). *The EU Is Abandoning Italy During the Coronavirus Crisis*.
<https://foreignpolicy.com/2020/03/14/coronavirus-eu-abandoning-italy-china-aid/>
- Bridge Beijing. (2022, May 22). *Tracking China's COVID-19 Vaccine Distribution - Bridge Consulting*. Bridge Beijing. <https://bridgebeijing.com/our-publications/our-publications-1/china-COVID-19-vaccines-tracker/>
- Fuchs, A., Schmidt, S. S., Wang, F., Kaplan, L., Kis-Katos, K., & Turbanisch, F. (2020). *Mask Wars: China's Exports of Medical Goods in Times of COVID-19*. 398.
- Green, M., & Medeiros, E. S. (2020). The Pandemic Won't Make China the World's Leader. *Foreign Affairs, March*, 1–10.
- Kobierecka, A., & Kobierecki, M. M. (2021). Coronavirus diplomacy: Chinese medical assistance and its diplomatic implications. *International Politics*, 58(6), 937–954.
<https://doi.org/10.1057/s41311-020-00273-1>
- Kurtzer, J. (2020, November 17). *China's Humanitarian Aid: Cooperation amidst Competition | Center for Strategic and International Studies*. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/chinas-humanitarian-aid-cooperation-amidst-competition>
- Mohammed, A. J. (2020). Amina J Mohammed di Twitter: "No one will ever be truly safe until

- everyone is safe. . In *Twitter*. Twitter.
<https://twitter.com/aminajmohammed/status/1276522484217647104>
- Prabaningtyas, R. F., & Prabandari, A. (2020). Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 269–294. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/905>
- Scimia, E. (2020). *CHINA – EUROPE EU leaders fear Beijing’s “coronavirus diplomacy.”* <https://www.asianews.it/news-en/EU-leaders-fear-Beijing’s-’coronavirus-diplomacy’-49657.html>
- The Guardian. (2020). *US hijacking mask shipments in rush for coronavirus protection | Coronavirus | The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/global-battle-coronavirus-equipment-masks-tests>
- United Nations. (2021). *Developing Countries Need More Financial Aid, Influence in Multilateral Institutions to Overcome Economic Devastation from COVID-19, Speakers Tell General Assembly | UN Press*. <https://press.un.org/en/2021/ga12366.doc.htm>
- Verma, R. (2020). China’s diplomacy and changing the COVID-19 narrative: <https://doi.org/10.1177/0020702020930054>, 75(2), 248–258.
<https://doi.org/10.1177/0020702020930054>
- Yang, X. A. (2021). Redefining a Philosophy for World Governance. *Journal of Chinese Governance*, 6(3), 460–462. <https://doi.org/10.1080/23812346.2021.1875677>
- Yi, W. (2020, July 17). *Multilateralism after COVID 19: what kind of UN do we need at the 75th anniversary? .. Sustainable Development Knowledge Platform*. United Nations. <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=6783&menu=2993>
- Yuan, S. (2020). *China in coronavirus propaganda push as US ties worsen | Coronavirus pandemic News | Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2020/3/26/china-in-coronavirus-propaganda-push-as-us-ties-worsen>
- Zhang, F. (2005). *The Tianxia System : World Order In A Chinese Utopia*.
- Zhao, S. (2020). Rhetoric and Reality of China’s Global Leadership in the Context of COVID-19: Implications for the US-led World Order and Liberal Globalization. *Journal of Contemporary China*, 00(00), 1–16. <https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1790900>
- Zhao 赵汀阳, T. (2021). ‘All-under-Heaven’ (tianxia 天下): between idealism and realism. *Journal of Global Ethics*, 17(1), 26–41. <https://doi.org/10.1080/17449626.2021.1964579>